

# ANALISA TEORITIK URGENSI REDENOMINASI ATAS NILAI RUPIAH

Anne Dahliawati

Universitas Gunadarma, [anne@staff.gunadarma.ac.id](mailto:anne@staff.gunadarma.ac.id)

## ABSTRAK

*Rencana akan adanya redenominasi oleh Bank Indonesia menimbulkan sejumlah analisa pro dan kontra yang mengkhawatirkan bagi sektor perekonomian, khususnya nilai mata uang dan pola perubahan stigma di perekonomian secara makro dan mikro di Indonesia. Secara konsep redenominasi diibaratkan sebagai dua keping sisi mata uang, yang akan memiliki keuntungan, namun di salah satu sisi dapat menjadi kerugian dan bumerang bagi pemerintahan ekonomi Indonesia. Di satu sisi diharapkan menimbulkan keefektifan dan tingginya kualitas nilai mata uang, namun di sisi lain terjadi penolakan dan argumentasi kontradiktif akan dampak redenominasi yang kurang dalam sosialisasinya dapat memberikan gambaran pemotongan nilai intrisik mata uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa atas rencana redenominasi rupiah terhadap kajian Akuntansi Pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, data diperoleh dari beberapa referensi yang kemudian diolah dan intepretasi hingga menghasilkan suatu analisa. Fokus analisa membahas pada kajian bagaimana berdasarkan sumber yang ada Indonesia mampu melaksanakan redenominasi rupiah Redenominasi akan membuat beberapa signifikansi khusus atas nilai keuntungan, salah satunya adalah redenominasi memberikan efisiensi dalam proses pencatatan sebab dengan redenominasi yang memang benar terjadi simplifikasi hitung-hitungan uang di Indonesia. Redenominasi rupiah adalah sesuatu hal yang menarik untuk dilaksanakan dan diimplementasikan di Indonesia. Redenominasi dapat diwujudkan di Indonesia dengan baik disertai kesiapan yang tercermin dari stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Sehingga untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan (jangka pendek) redenominasi belum menjadi prioritas untuk segera diimplementasikan di Indonesia jika berkaca pada kestabilan aspek perekonomian dan politik di Indonesia.*

*Kata Kunci: Redenominasi, Nilai Rupiah, Akuntansi Pembangunan*

## PENDAHULUAN

Suatu langkah kemajuan sistem perekonomian dalam pembangunan dapat ditunjukkan dari bagaimana suatu sistem dapat dijalankan dengan baik, sehingga keberadaan atas stabilisasi nilai mata uang terhadap mata uang asing, proses pencatatan akuntansi, serta beberapa hal dalam sektor ekonomi makro terdeteksi dan berjalan dalam kondisi stabil. Adanya isu yang mencuat di dalam perekonomian Indonesia dan menelan sejumlah analisa pro dan kontra yang mengkhawatirkan bagi sektor perekonomian, khususnya nilai mata uang dan pola perubahan

stigma di perekenomian secara makro dan mikro di Indonesia, yaitu isu mengenai redenominasi rupiah yang diangkat oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) sendiri mewacanakan rencana redenominasi rupiah atau dengan kata lain pengurangan nilai pecahan rupiah tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut. Bank Indonesia memiliki suatu tujuan praktis atas redenominasi rupiah yaitu untuk menyederhanakan pembayaran atau efisiensi penghitungan dalam sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia (Amir, 2011:73).

Merujuk pada bagaimana nilai efisiensi akan diterapkan, maka sesungguhnya dalam hal ini redenominasi menyoroti bilamana terjadinya pengurangan digit. Kondisi digit yang memiliki banyak nilai nol membuat suatu ketidakefisienan dalam melakukan transaksi, bahkan lebih jauh akan berdampak pada aspek psikologis bagi individu. Hal tersebut dapat terlihat ketika membeli suatu barang/benda/jasa dengan nilai tukar mata uang yang memiliki banyak digit nol, maka secara tidak langsung membuat kondisi psikologis seseorang memandang merupakan suatu hal yang mahal dan sebagai objek langka. Semakin banyak nol yang dimiliki akan menjadikan nilai suatu barang tersebut tinggi (Ahmad dan Efnu, 2013).

Secara nilai efektifitas, maka kondisi ini tentu sangat berbeda jika melihat negara-negara di luar negeri, yang mana di luar negeri hanya dalam angka satuan tanpa angka nol. Bahkan beberapa barang dijual dengan pecahan mata uang kecil, misalnya sen. Beberapa negara sendiri telah melakukan konsep redenominasi atas mata uangnya untuk menaikkan psikologi nilai uangnya, misalnya Afghanistan yang menghilangkan 3 digit untuk angka nolnya, Turki mengurangi 6 angka nol, Zimbabwe menghilangkan 3 angka nol, Ghana yang menghilangkan 4 angka nol, Argentina menghilangkan 13 angka nol melalui empat kali operasi: tahun 1970, 1983, 1985, 1992. Israel yang menghilangkan sembilan angka nol melalui dua kali operasi: tahun 1980 dan 1985, bahkan negara yang memiliki karakter perekonomian seperti Indonesia seperti Brazil pun juga tercatat pernah menghilangkan 18 angka nol, melalui enam kali operasi: tahun 1967, 1970, 1986, 1989, 1993 dan 1994 (Ahmad dan Efnu, 2013).

Secara konsep redenominasi diibaratkan sebagai dua keping sisi

mata uang, yang mana akan memiliki keuntungan namun di salah satu sisi dapat menjadi kerugian dan bumerang bagi pemerintahan ekonomi Indonesia. Di satu sisi diharapkan menimbulkan keefektifan dan tingginya kualitas nilai mata uang, namun di sisi lain terjadi penolakan dan argumentasi kontradiktif akan dampak redenominasi yang kurang dalam sosialisasinya dapat memberikan gambaran pemotongan nilai intrinsik mata uang. Banyak pengamat menyatakan bahwa terminologi redenominasi tidak mudah dilaksanakan, dikarenakan masyarakat awam dapat serta merta menyebut pengguntingan (nilai intrinsik) uang, yang mana bertentangan dengan makna redenominasi adalah penciptaan angka nominal pada lembaran uang. Selain itu, pengamat juga menyebutkan bahwa redenominasi mata uang rupiah tidak perlu dilakukan, mengingat Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter hanya dapat mengontrol kondisi moneter, sementara pengendalian harga-harga barang yang bukan otoritas Bank Indonesia (Faisal, 2010:2) membuat proses redenominasi menjadi suatu hal yang dapat berpotensi mengancam perekonomian secara makro dalam kurun waktu yang cepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa atas rencana redenominasi rupiah terhadap kajian Akuntansi Pembangunan di Indonesia, sehingga mampu memberikan gambaran bagi masyarakat umum dan ilmu pengetahuan mengenai analisa redenominasi rupiah dan dampaknya terhadap Akuntansi Pembangunan di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kajian teoritis mengenai analisa atas urgensi rencana redenominasi rupiah ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji secara kepustakaan dan mendapatkan data dari beberapa referensi yang kemudian dianalisa dan diinterpretasi sehingga menghasilkan suatu analisa. Data-data didapatkan dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain di mana dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Metode kepustakaan adalah suatu pendekatan yang berdasarkan referensi-referensi ilmiah (Ujang, 2012:35). Fokus analisa membahas pada kajian bagaimana berdasarkan sumber yang ada Indonesia mampu melaksanakan redenominasi rupiah. studi kepustakaan meliputi proses umum mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wacana Redenominasi Atas Nilai Rupiah**

Secara awam tentu saja redenominasi dicerna sebatas pengurangan digit dari mata uang, namun tanpa mengurangi nilainya (Qouli, 2010:2). Rencana redenominasi rupiah ini sendiri telah menjadi wacana yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada awal Mei 2010 dan dikonfirmasi oleh Gubernur BI terpilih, yaitu Darmin nasution pada 31 Juli 2010. Di mana menurut beliau bahwa, redenominasi rupiah adalah sebuah rencana kebijakan Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, dalam rangka pengurangan nilai

pecahan mata uang Rupiah tanpa mengurangi nilainya dengan cara menghilangkan tiga nol terakhir (Qouli, 2010:13).

Wacana tersebut juga seketika itu pula menilai bahwa mata uang rupiah sudah saatnya untuk diredenominasi guna menghindari kerugian yang mungkin terjadi dimasa mendatang sebagai akibat nilai transaksi yang semakin besar melampaui sistim penghitungan yang digunakan saat ini (Darmin dalam Berita Indonesia, 2013). Nilai urgensi dari redenominasi rupiah untuk segera diwacanakan adalah berdasarkan pertimbangan biayanya akan menjadi sangat mahal. Karena dalam kurun waktu lima hingga tujuh tahun ke depan, aplikasi pembukuan ataupun alat hitung yang ada pada masyarakat diperkirakan tidak akan sanggup lagi untuk menghitung transaksi yang berkembang melampaui digit pada mesin hitung.

Wacana tersebut muncul di saat perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi baik dengan inflasi yang terkendali, maka saat inilah momen yang tepat untuk melakukan redenominasi. Urgensi redenominasi bukan untuk sekarang, tapi untuk beberapa tahun mendatang. Namun, karena mengingat prosesnya membutuhkan waktu lama, maka sebaiknya harus dimulai dari sekarang.

Sedangkan, dalam wacananya, redenominasi rupiah sendiri akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang terbagi atas beberapa periode seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
**Tabel Rencana Periodesasi Redenominasi Nilai Rupiah oleh Bank**

| Tahun     | Periode          | Penjelasan   |
|-----------|------------------|--|
| 2011-2012 | Masa Sosialisasi | Masa menyiapkan berbagai macam hal menyangkut akuntansi, pencatatan, sistem informasi. Bank Indonesia meyakini waktu dua tahun cukup untuk masa sosialisasi.   |
| 2013-2015 | Masa Transisi I  | Dalam masa ini, nantinya harga barang akan Ditulis dalam dua harga yaitu terdiri atas rupiah lama dan rupiah baru. Misalnya, barang seharga Rp10.000 akan ditulis dalam dua harga yaitu Rp10.000 dan Rp10 (baru). Uang saat ini akan disebut rupiah lama, yang baru akan disebut rupiah baru. Selama masa ini, masyarakat akan menggunakan dua mata uang yaitu rupiah lama dan rupiah baru. Begitu juga untuk pengembalian uang, boleh menggunakan keduanya. BI juga akan perlahan-lahan mengganti uang rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru. |
| 2016-2018 | Masa Transisi 2  | Uang kertas sekarang ( rupiah lama) akan Benar-benar habis. BI akan melakukan penarikan uang lama  |
| 2019-2020 | Masa Adaptif     | Kata-kata uang baru yang menandakan Pengganti uang lama akan dihilangkan. Indonesia kembali pada rupiah seperti saat ini, namun nilai uangnya lebih kecil. Untuk mata uang kecil berlaku uang koin dan nilai pecahan sen akan berlaku lagi.  |

**Sumber: Wacana Bank Indonesia (Darmin, 2013)**

Selain itu, jika merujuk pada pengaruh internasional, maka wacana kebijakan redenominasi ini diambil setelah hasil riset Bank Dunia menyebutkan bahwa uang pecahan Rupiah Indonesia Rp 100.000 adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Dong Vietnam (VND) 500.000. Selain itu, wacana redenominasi itu sendiri memberikan suatu dampak baik atas biaya produksi, di mana wacana dari Bank Indonesia juga mengungkapkan hasil kajiannya tentang berbagai efisiensi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan redenominasi atau perampingan angka nominal rupiah. Salah satunya adalah penghematan biaya pencetakan uang oleh bank sentral. Penghematan tersebut diperoleh

dari frekuensi pencetakan pecahan mata uang yang jadi lebih sedikit.

Wacana yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia membuat peneliti menganalisa nilai keuntungan dan kontradiktifnya dan memberikan generalisasi berupa pandangan peneliti mengenai nilai urgensi diperlukannya kebijakan redenominasi rupiah yang hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra untuk diperdebatkan keefektifan serta manfaatnya dalam perekonomian Indonesia.

#### **Nilai Keuntungan Bagi Ekonomi Atas Redenominasi Nilai Rupiah**

Redenominasi akan membuat beberapa signifikansi khusus atas nilai keuntungan, di mana salah satunya adalah redenominasi memberikan

efisiensi dalam proses pencatatan sebab dengan redenominasi yang memang benar terjadi simplifikasi hitung-hitungan uang di Indonesia. Mencermati sebelum keberadaan redenominasi, bahwa begitu lama rakyat harus berhitung-hitung dalam jumlah 1.000 kali lipat lebih berat, padahal dengan nilai barang seperseribu (Ahmad dan Efnu, 2013).

Signifikansi lain adalah perspektif psikologis bagi masyarakat yang berada di dalam Indonesia, di mana akibat keberadaan redenominasi rupiah, maka nilai kontrak-kontrak Indonesia dengan negara lain jika dengan mata uang rupiah akan bernilai miliaran dengan banyak sekali deretan angka nol. Namun jika dengan mata uang asing kelihatan lebih kecil nilainya dan tidak banyak nol.

Redenominasi ini sendiri akan membuat dampak positif terhadap angka-angka dalam APBN dan RAPBN tahun berikutnya. Nilai yang mengecil akan membantu terutama saat nilai riil rupiah memprihatikan (Faisal, 2010). Dengan redenominasi, nilai riil rupiah jadi lebih mudah dilakukan. Selain itu, redenominasi sangat baik terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dikarenakan sebagai akibat dari redenominasi rupiah sendiri yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dollar menguat seribu kali. Di mana pada saat tersebut nilai satu US dolar tiba-tiba menjadi Rp9. Pengamat sendiri pada akhirnya memberikan analisa atas ketidak yakinan bahwa penerapan redenominasi rupiah bisa menyebabkan pelarian dana asing, termasuk konversi dana rupiah ke dalam dolar AS (Ruslan, 2010: 22).

Hal tersebut menjadi indikasi bahwa sepiantas menguatnya rupiah akan mengancam komoditas dari Indonesia, namun dari simulasi ternyata tidak sama sekali. Penulis mengamati bahwa nilai komoditas tidak akan mengalami perubahan dikarenakan

proses redenominasi tentu saja akan juga diikuti dengan redenominasi atas nilai harga barang.

### **Analisa Kontradiktif Rencana Pelaksanaan Atas Redenominasi Nilai Rupiah**

Selain signifikansi keuntungan yang didapat akibat redenominasi rupiah, maka penulis juga mencermati bagaimana terdapat adanya suatu hal yang kontradiktif. Salah satu hal yang menurut peneliti jauh dari nilai keuntungan adalah terjadinya paradoks dalam dampak psikologis. Dengan nilai tukar rupiah yang sudah mengecil dari nilai tukar mata uang asing, maka ada suatu kondisi, di mana kondisi ini secara tidak langsung menimbulkan pengaruh psikologis terhadap perwakilan Indonesia di luar karena menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah begitu rendah. Di tataran teknis, Indonesia sudah begitu inferior. Demikian pula ketika menyusun kontrak perdagangan, mata uang rupiah juga inferior. Jadi, posisi Indonesia, jika tidak dilakukan redenominasi, akan menderita luar-dalam (Ahmad dan Efnu, 2013) karena nilai yang dianggap kecil.

Signifikansi lain adalah dalam mempersiapkan redenominasi rupiah, maka pemerintah sendiri akan menanggung beban penciptaan nilai mata uang baru yang lebih kecil dari 1 rupiah dengan lebih besar. Hal tersebut dikarenakan munculnya suatu kemungkinan beberapa kebutuhan penduduk Indonesia tidak sampai satu rupiah per satuan barang, dan ini memerlukan uang di bawah satu rupiah (Ahmad dan Efnu, 2013). Karenanya beberapa pengamat mengkritisi atas rencana redenominasi rupiah itu sendiri, dikarenakan harga barang baru dapat dipantau, apabila ada badan penyangga barang yang mengontrol pergerakan harga. Namun, itu tetap saja sulit diwujudkan.

Penelitian menunjukkan bahwa sisi lain dari keuntungan redenominasi rupiah akan mengakibatkan keuntungan, namun secara kompleks redenominasi rupiah untuk saat ini tidak perlu dijadikan prioritas Bank Indonesia (BI) karena struktur dan daya saing ekonomi nasional masih diwarnai ketimpangan antarwilayah maupun antara perkotaan dan perdesaan (Ginanjari dalam Suara Karya, 2010). Dengan kata lain, kondisi ekonomi nasional saat ini tak kondusif bagi tindakan redenominasi rupiah ditambah dengan maraknya isu politik dalam menyambut pemilihan umum di tahun 2014. Ketidak stabilan kondisi perekonomian dan kondisi politik di Indonesia dapat menjadikan redenominasi menjadi suatu bumerang akan beban Bank Indonesia dan stake holder pemerintahan untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat dan berpotensi munculnya inflasi yang lebih tinggi dan dengan kurun waktu yang lebih cepat.

Signifikansi atas efektifitas nilai pencatatan akibat pengurangan digit merupakan hal yang kontradiktif dengan serta merta menjadi alasan redenominasi ini sendiri. Produk-produk perbankan seperti penggunaan kartu kredit, transaksi online, dan beberapa bentuk pembayaran tanpa harus menyertakan uang di tangan adalah suatu pemecahan masalah. Jika nantinya ditulis dengan redenominasi dalam pencatatan laporan keuangan, itu bukanlah menjadi masalah besar karena tidak akan berdampak pada sektor lainnya. Selain itu, dengan adanya redenominasi rupiah, maka satuan terkecil akan menyulitkan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang tergolong menggunakan "*uang receh*" ini diakibatkan adanya pembulatan, dan sifat pembulatan yang selalu ke atas, mengakibatkan semakin menyulitkan masyarakat lapisan menengah ke bawah. Jelas dalam hal ini, efisiensi

redenominasi perlu ditinjau kembali seiring wacana dari Bank Indonesia.

Menghindari stigma negatif dan pandangan negatif dari peneliti sendiri, namun menurut peneliti dengan mengurangi tiga nolnya dengan alasan bahwa rupiah jadi lebih kuat tidak memberikan dampak lain yang justru akan lebih mengancam sektor lainnya. Pasalnya, rupiah yang makin kuat belum tentu menguntungkan ekonomi dan rakyat, karena ini akan membuat ekspor Indonesia menjadi melemah. Meninjau pada pernyataan Ginandjar Kartasasmita yang menyebutkan bahwa rupiah makin menguat, akan makin melemahkan daya saing ekspor industri kita yang sudah begitu lemah karena ongkos produksi yang tinggi dan cenderung menguntungkan bagi barang impor dan importir (Ginanjari dalam Suara Karya, 2010), bukan produk dalam negeri dan produsen (termasuk buruh) dalam negeri.

Bagi negara yang sedang berkembang dengan nilai inflasi yang tinggi seperti Indonesia, maka redenominasi rupiah belumlah menjadi hal yang penting dan menjamin akan menciptakan kestabilan atas nilai tukar rupiah. Oleh karenanya, dalam kaitannya, maka beberapa aspek perlu dipertimbangkan BI sebelum melakukan redenominasi rupiah, yakni struktur dan daya saing ekonomi nasional harus cukup kuat sehingga tidak ada lagi ketimpangan antarwilayah serta antara kota dan desa.

### **Hasil Penelitian atas Rencana Redenominasi Nilai Rupiah**

Dalam konsep redenominasi rupiah sendiri haruslah diikuti dengan membuat kebijakan atas redenominasi nilai barang. Jika nilai harga barang tidak mengikutinya justru akan menimbulkan kepanikan pasar dan memunculkan dampak atas ekonomi makro, di mana keberadaan Indonesia pada kedudukan hiperinflasi baru.

Dalam perencanaan redenominasi rupiah, maka pemerintah sendiri akan membutuhkan suatu kesipian dalam menyediakan nilai mata uang di bawah 1 rupiah. Pemerintah sendiri harus melakukan persiapan dengan menerapkan kebijakan redenominasi dengan diiringi membuat mata uang kecil sebanyak-banyaknya. Hal tersebut didasari bahwa mayoritas tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih kurang (Kotler, 2006: 90), sehingga uang pecahan kecil inilah yang sering digunakan di pasar-pasar tradisional, dibawa oleh sekitar mayoritas penduduk Indonesia dan beredar hampir 80 persen dari total peredaran uang Indonesia.

Kesiapan tersebut akan membuat masyarakat tradisional dengan uang kecilnya yang telah disediakan, maka tidak akan menarik harga di sektor riil menjadi mahal, dikarenakan uang pecahan kecil tidak ada. Namun, pembuatan nilai mata uang kecil mengindikasikan adanya penambahan biaya dalam produksinya seiring perapan redenominasi rupiah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada hakikatnya makna atas redenominasi rupiah sendiri, merupakan suatu upaya mengatasi permasalahan atas keberadaan pecahan mata uang yang terlalu besar kurang efisien karena membuat proses pembayaran dan transaksi tunai. Sehingga nantinya pengurangan pecahan mata uang bisa menyederhanakan sistem akuntansi, transaksi dan perhitungan dalam mata uang.

Terdapat dua sisi perspektif dalam meninjau redenominasi rupiah, di mana nilai keuntungan akan merujuk pada konsep secara teoritis yang ada, seperti menciptakan efisiensi, menimbulkan aspek psikologis yang baik bagi masyarakat dan beberapa hal lainnya yang turut mendukung. Namun, secara sisi kontradiktifnya

redenominasi rupiah tanpa diikuti redenominasi harga barang dapat mengancam terjadinya inflasi yang begitu cepat sebagai akibat ketidak siapan, selain itu beban pemerintah dalam membuat mata uang kecil, nilai tukar yang mengecil juga menjadi paradoks permasalahan bagi perwakilan Indonesia yang melakukan kerjasama internasional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa redenominasi rupiah adalah sesuatu hal yang menarik untuk dilaksanakan dan diimplementasikan di Indonesia. Redenominasi dapat diwujudkan di Indonesia dengan baik disertai kesiapan yang tercermin dari stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Sehingga, penulis menilai untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan (jangka pendek) redenominasi belum menjadi prioritas untuk segera diimplementasikan di Indonesia jika berkaca pada kestabilan aspek perekonomian dan politik di Indonesia.

Rencana redenominasi rupiah akan bergantung pada bagaimana jajaran pemerintah dan stakeholdernya, seperti peranan bank Indonesia, kementerian perekonomian, serta pihak terkait untuk memberikan sosialisasi dan kesiapan bagi masyarakat. Kesiapan masyarakat sendiri merupakan bentuk indikasi bekerjanya dengan baik redenominasi dan pengaruhnya terhadap sistem perekonomian di Indonesia.

Meskipun redenominasi mengandung pengertian hanya untuk menyederhanakan pecahan uang rupiah tanpa mengurangi nilainya, alangkah baiknya bila rencana positif redenominasi harus dilakukan secara hati-hati dikarenakan keberadaan suatu dampak domino dari sisi psikologi kepada masyarakat dan investor, karena mereka tanpa diiringi sosialisasi yang jelas akan membuat salah pengertian dan mengakibatkan terjadinya terjadi gejala ekonomi dimana terjadi

kepanikan di masyarakat, khususnya investor.

Redenominasi atas rupiah akan memungkinkan terjadi ketika kedudukan sistem ekonomi Indonesia telah kuat dan diiringi dengan situasi politik yang stabil. Kesemuanya tentu akan memudahkan proses redenominasi dikarenakan jika keduanya belum terpenuhi, maka belum terwujudnya kepercayaan pelaku bisnis untuk yakin bahwa ekonomi berkinerja baik, redenominasi bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi, jika pelaku bisnis berpersepsi ekonomi melambat atau memburuk, maka redenominasi mengakibatkan angka inflasi meningkat.

Karena itu secara umum rekomendasi akan ditujukan kepada peran Bank Indonesia dan stakeholder pemerintahan ekonomi di Indonesia, untuk bergantung dengan bagaimana pihak Bank Indonesia dan pihak lainnya dalam melakukan sosialisasi. Keberadaan sosialisasi akan menyebabkan suatu dampak bagi kesiapan masyarakat, hal ini menjadi penting mengingat tanpa kesiapan tentu saja redenominasi akan menjadi suatu hal yang ditolak dan dianggap menurunkan daya beli masyarakat Indonesia yang berpotensi mengancam perekonomian secara makro. Oleh karenanya mutlak kestabilan ekonomi dan politik menjadi titik tumpu untuk menjalankan kebijakan redenominasi rupiah di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, Amri. (2011, Oktober). Redenominasi Rupiah dan Sistem Keuangan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1, 4.
- Anwar, Farihal. (2010, Agustus 4). Redenominasi Rupiah Tak Perlu. *Suara Karya*.
- Kartasasmita, Ginanjar. (2010, Agustus 2010). Redenominasi Rupiah Tak Prioritas. *Suara Karya*.

Kotler Philip. (2006). *Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian)*, Diterjemahkan oleh Jaka Wasana. Jakarta: Erlangga.

Nurullah, Ahmad dan Effnu Subiyanto. (2013, Februari 13). Urgensi Redenominasi Rupiah. *Surabaya Jurnal Nasional*.

Qouli, Muhammad. (2010). Kesiapan dan Persiapan Indonesia serta Dampaknya dalam Melaksanakan Kebijakan Redenominasi Rupiah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Ruslan, Rosady. (2010). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.